

BAB II

KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BUDAYA GOTONG

A. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut. Menurut antropolog Elman Service, untuk memudahkan mempelajari keanekaragaman masyarakat, masyarakat dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan peningkatan ukuran populasi, sentralisasi politik, serta stratifikasi sosial, yaitu: kawanan, suku, kedaduan, dan negara. Jenis masyarakat paling kecil atau kawanan biasanya hanya terdiri atas beberapa kelompok, banyak diantaranya merupakan kumpulan dari satu atau beberapa keluarga besar.

Menurut Linton Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan tertentu. Pengertian Masyarakat menurut Peter L. Berger adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat pada umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang;
- b. Bercampur/bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama;
- c. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan;
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama.

2. Ciri-ciri Masyarakat

Menurut Marion Levy bahwa ada empat kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah kelompok dapat disebut sebagai masyarakat, yaitu: Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggotanya. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran. Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada. Kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto unsur-unsur pembentuk masyarakat adalah sebagai berikut: Beranggotakan dua orang atau lebih. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan. Berhubungan dengan jangka waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang berkomunikasi, dan membuat aturan-aturan yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan antar anggota masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, ciri-ciri masyarakat yaitu: Hidup secara berkelompok. Melahirkan kebudayaan. Mengalami perubahan.

Adanya interaksi Adanya seorang pemimpin. Memiliki stratifikasi sosial. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi. Negara modern misalnya, merupakan kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana, yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan frekuensi yang tinggi. Suatu negara modern mempunyai suatu jaringan komunikasi berupa jaringan jalan raya, jaringan jalan kereta api, jaringan perhubungan udara, jaringan telekomunikasi, sistem radio dan televisi, berbagai macam surat kabar di tingkat nasional, suatu sistem upacara pada hari-hari raya nasional dan sebagainya. Negara dengan wilayah geografis yang lebih kecil berpotensi untuk berinteraksi

secara intensif daripada negara dengan wilayah geografis yang sangat luas. Tambahan pula bila negara tersebut berupa kepulauan, seperti halnya negara kita. Adanya prasarana untuk berinteraksi menyebabkan warga dari suatu kelompok manusia itu saling berinteraksi. Sebaliknya, bila hanya adanya suatu potensi untuk berinteraksi saja belum berarti bahwa warga dari suatu kesatuan manusia itu benar-benar akan berinteraksi. Suatu suku bangsa, misalnya saja suku bangsa Bali, mempunyai potensi untuk berinteraksi, yaitu bahasa Bali.

Namun, adanya potensi itu saja tidak akan menyebabkan bahwa semua orang Bali tanpa alasan mengembangkan aktivitas yang menyebabkan suatu interaksi secara intensif di antara semua orang Bali tadi. Hendaknya diperhatikan bahwa tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau berinteraksi itu merupakan masyarakat, karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan lain yang khusus. Sekumpulan orang yang mengerumuni seorang tukang penjual jamu di pinggir jalan tidak dapat disebut sebagai suatu masyarakat. Meskipun kadang-kadang mereka juga berinteraksi secara terbatas, mereka tidak mempunyai suatu ikatan lain kecuali ikatan berupa perhatian terhadap penjual jamu tadi. Demikian juga sekumpulan manusia yang menonton suatu pertandingan sepak bola, dan sebenarnya semua kumpulan manusia penonton apapun juga, tidak disebut masyarakat. Sebaliknya, untuk sekumpulan manusia itu kita pakai istilah kerumunan. Dalam bahasa Inggris telah dipakai istilah crowd. Ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu. Lagi pula, pola itu harus bersifat mantap dan kontinu, dengan perkataan lain, pola khas itu harus sudah menjadi adat istiadat yang khas.

Dengan demikian, suatu asrama pelajar, suatu akademi kedinasan, atau suatu sekolah, tidak dapat kita sebut masyarakat, karena meskipun kesatuan manusia yang terdiri dari murid, guru, pegawai administrasi, serta para karyawan lain itu terikat dan diatur tingkah lakunya oleh berbagai norma dan aturan sekolah dan lain-lain, tetapi sistem normanya hanya

meliputi beberapa sektor kehidupan yang terbatas saja. Sedangkan sebagai kesatuan manusia, suatu asrama atau sekolah itu hanya bersifat sementara, artinya tidak ada kontinuitasnya.

Selain ikatan adat istiadat khas yang meliputi sektor kehidupan dan kontinuitas waktu, warga suatu masyarakat harus juga mempunyai ciri lain, yaitu suatu rasa identitas bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lainnya. Ciri ini memang dimiliki oleh penghuni suatu asrama atau anggota suatu sekolah. Akan tetapi, tidak adanya sistem norma yang menyeluruh dan tidak adanya kontinuitas, menyebabkan penghuni suatu asrama atau murid suatu sekolah tidak bisa disebut masyarakat. Sebaliknya suatu negara, suatu kota, atau desa, misalnya, merupakan suatu kesatuan manusia yang memiliki keempat ciri terurai di atas, yaitu (1) interaksi antar warga-warganya, (2) adat istiadat, norma, hukum dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga negara kota atau desa; (3) kontinuitass waktu; (4) dan rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Itulah sebabnya suatu negara atau desa dapat kita sebut masyarakat dan kita memang sering berbicara tentang masyarakat Indonesia, masyarakat Filipina, masyarakat Medan, masyarakat Sala, masyarakat Balige, masyarakat Ciamis, atau masyarakat desa Trunyan. Setelah uraian tadi, sekarang tiba waktunya untuk merumuskan suatu definisi mengenai konsep masyarakat untuk keperluan analisis antropologi.

Dengan memperhatikan ketiga ciri terurai sebelumnya, definisi mengenai masyarakat secara khusus dapat kita rumuskan sebagai berikut: Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Definisi itu mempunyai suatu definisi yang diajukan oleh J.L. Gillin dan J.P. Gillin dalam buku mereka *Cultur Sociology* (1954: hlm.139), yang merumuskan bahwa masyarakat tau society adalah *the largest grouping in which common customs, traditions, attitudes and feelings of unity are operative*". Unsur grouping dalam definisi

kita, unsur common customs dan traditions adalah unsur “adat istiadat” dan “kontinuitas” dalam definisi kita, serta unsur common attitudes and feelings of unity sama dengan unsur “identitas bersama”. Suatu tambahan dalam definisi Gillin adalah unsur (the largest) “terbesar” yang memang tidak dimuat dalam definisi kita. Walaupun demikian, konsep itu dapat diterapkan pada konsep masyarakat suatu bangsa atau negara, misalnya konsep masyarakat Indonesia, masyarakat Filipina, masyarakat Belanda, masyarakat Amerika, dalam contoh kita sebelumnya. Meskipun kita sering berbicara tentang konsep masyarakat dalam arti luas, seperti konsep masyarakat negara Indonesia, tetapi kenyataannya, dalam pikiran kita tidak terbayang seluruh manusia yang berjumlah kurang lebih 230 juta jiwa Indonesia itu. Biasanya yang terbayang dalam pikiran kita ialah lingkaran manusia Indonesia sekitar diri kita sendiri, manusia Indonesia di suatu lokasi tertentu, atau dalam ikatan suatu kelompok tertentu. Dalam bukunya, Asas-asas Sosiologi guru besar ilmu sosiologi Universitas Gadjah Mada, M.M. Djodjodigono, membedakan antara konsep “masyarakat dalam arti yang luas dan sempit”. Berdasarkan konsep Djodjodigono ini dapat dikatakan masyarakat Indonesia sebagai contoh suatu “masyarakat dalam arti luas”. Sebaliknya, masyarakat yang terdiri dari warga suatu kelompok kekerabatan seperti dadia, marga, dan suku, kita anggap sebagai contoh dari suatu “masyarakat dalam arti sempit”.

Kesatuan wilayah, kesatuan adat-istiadat, rasa identitas komunitas dan rasa royalitas terhadap komunitas sendiri, merupakan ciri-ciri suatu komunitas, dan pangkal dari perasaan seperti patriotism, nasionalisme dan sebagainya, yang biasanya bersangkutan dengan negara. Memang, suatu negara merupakan wujud dari suatu komunitas yang paling besar. Selain negara, kesatuan-kesatuan seperti kota, desa, suatu RW atau RT, juga sesuai dengan definisi kita mengenai komunitas, yaitu: suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata, dan berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas. Uraian sebelumnya, kesatuan hidup manusia di suatu negara,

desa atau kota, juga kita sebut “masyarakat”. Apakah dengan demikian konsep masyarakat sama dengan konsep komunitas? Kedua istilah itu memang bertumpang-tindih, tetapi istilah masyarakat adalah istilah umum bagi suatu kesatuan hidup manusia, dan karena itulah bersifat luas daripada istilah komunitas. Masyarakat adalah semua kesatuan hidup manusia yang bersifat mantap dan terikat oleh satuan adat-istiadat dan rasa identitas bersama, tetapi komunitas bersifat khusus karena ciri tambahan ikatan lokasi dan kesadaran wilayah tadi. Kategori Sosial Masyarakat sebagai suatu kelompok manusia yang sangat umum sifatnya, mengandung kesatuan-kesatuan yang sifatnya lebih khusus, tetapi belum tentu mempunyai syarat pengikat yang sama dengan suatu masyarakat. Kesatuan sosial yang tidak mempunyai syarat pengikat itu serupa dengan “kerumunan” atau crowd yang telah kita pelajari pada sebelumnya, tidak mempunyai sifat-sifat masyarakat. Kesatuan sosial itu adalah kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena adanya suatu ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan kepada manusia-manusia itu.

Ciri-ciri objektif itu biasanya dikenakan oleh pihak dari luar kategori sosial itu sendiri tanpa disadari oleh yang bersangkutan, dengan suatu maksud praktis tertentu. Misalnya, dalam masyarakat suatu negara ditentukan melalui hukumnya bahwa ada kategori warga di atas umur 18 tahun, dan kategori warga di bawah 18 tahun, dengan maksud untuk membedakan antara warga negara yang mempunyai hak pilih dan warga negara yang tidak mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Contoh lain adalah bahwa dalam masyarakat itu juga ada suatu kategori orang yang memiliki mobil, dan suatu kategori orang yang tidak memilikinya, dengan maksud untuk menentukan warga negara yang harus membayar sumbangan wajib dan yang bebas dari sumbangan wajib. Serupa dengan itu, dalam suatu masyarakat dapat diadakan bermacam-macam penggolongan berdasarkan ciri-ciri objektif untuk berbagai maksud, seperti kategori pegawai negeri untuk menghitung hadiah lebaran, kategori anak di bawah umur 17 tahun

untuk larangan menonton film orang dewasa, kategori pelajar untuk memperkirakan pendapatan negara dari SPP dan sebagainya. Dengan demikian, tidak hanya pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu kota saja yang dapat mengadakan berbagai macam penggolongan seperti itu terhadap warga masyarakat, tetapi seorang peneliti untuk keperluan analisisnya dapat juga misalnya mengadakan berbagai macam penggolongan terhadap penduduk dari masyarakat yang menjadi objek penelitiannya tanpa disadari oleh mereka yang bersangkutan. Kecuali persamaan ciri objektif tadi yang dikenakan kepada mereka oleh pihak luar, biasanya tidak ada unsur lain yang mengikat suatu kategori sosial. Orang-orang dalam suatu kategori sosial, misalnya semua anak di bawah 17 tahun, biasanya tidak ada suatu orientasi sosial yang mengikat mereka. Mereka juga tidak memiliki potensi yang dapat mengembangkan suatu interaksi di antara mereka sebagai keseluruhan. Mereka juga tidak mempunyai identitas (merupakan hal yang logis karena penggolongan ke dalam suatu kategori sosial itu dilakukan oleh pihak luar terhadap diri mereka, dengan ciri-ciri kriteria yang biasanya tidak mereka sadari). Suatu kategori sosial biasanya juga tidak terikat oleh kesatuan adat, sistem nilai, atau norma tertentu. Suatu kategori sosial tidak mempunyai lokasi, tidak mempunyai organisasi, tidak mempunyai pimpinan.

B. Budaya Gotong Royong

1. Pengertian Kebudayaan

Secara etimologis, kata “Kebudayaan” berasal dari bahasa Sanskerta, *Buddhayah*, bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti akal atau budi. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni dan bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya

diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Dengan demikian budaya dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal dan cara hidup yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Ada pendapat lain yang mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budi-daya yang berarti daya dari budi. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman (kodrat dan masyarakat) yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Malinowski menyebutkan bahwa kebudayaan pada prinsipnya berdasarkan atas berbagai sistem kebutuhan manusia. Tiap tingkat kebutuhan itu menghadirkan corak budaya yang khas. Misalnya, guna memenuhi kebutuhan manusia akan keselamatannya maka timbul kebudayaan yang berupa perlindungan, yakni seperangkat budaya dalam bentuk tertentu seperti lembaga kemasyarakatan.

Dalam hal ini, Prof. Dr. Koentjoroningrat(1923-1999) mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang tak perlu dibiasakan dengan belajar, seperti tindakan naluri, refleks, beberapa tindakan akibat proses fisiologi, atau kelakuan apabila ia sedang membabi buta. Bahkan tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa oleh makhluk manusia dalam gennya bersamanya (seperti makan, minum, atau berjalan), juga dirombak olehnya menjadi tindakan yang berkebudayaan.

2. Pengertian Gotong Royong

Pengembangan Nilai Dan Tradisi Gotong Royong Dalam Bingkai Konservasi Nilai Budaya oleh Subagyo tahun 2012 mengungkapkan bahwa Gotong royong banyak diakui menjadi salah satu nilai yang menjadi ciri khas atau watak bangsa Indonesia sehingga dalam falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila, kita akan menemukan bahwa semangat gotong royong atau kebersamaan menjadi salah satu nilai pokok yang membentuk Pancasila, antara lain dalam nilai kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial.

Gotong royong merupakan adat istiadat berupa tolong menolong antara warga desa dalam berbagai macam aktivitas-aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga, hubungan kekerabatan, maupun hubungan yang berdasarkan efisiensi dan sifat praktis yang dianggap berguna bagi kepentingan umum. Melalui aktivitas gotong royong ini tercipta rasa kebersamaan dan hubungan emosional antarwarga, keakraban dan saling mengenal satu sama lain. Bintarto (1980, hlm. 14) mengungkapkan bahwa “dalam artian yang sebenarnya gotong royong dilaksanakan oleh sekelompok penduduk di suatu daerah yang datang membantu atau menawarkan tenaganya tanpa pamrih atau dengan lain perkataan secara sukarela menolong secara bersama”.

3. Peran Kebudayaan

Peran kebudayaan menyangkut segala aspek kehidupan manusia. mengemukakan bahwa peran kebudayaan sangat penting keberadaannya dan terbagi menjadi enam bagian (Umi Salamah, dkk (2014 : 35-36) yaitu:

- a. Sebagai suatu pedoman hubungan antara manusia atau kelompoknya.
- b. Wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan kemampuan-kemampuan.
- c. Sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia.
- d. Pembeda manusia dan binatang.
- e. Petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan.

- f. Pengaturan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak, menentukan sikap jika berhubungan dengan orang lain.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa peran kebudayaan sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman, dan tolak ukur kehidupan manusia agar terciptanya batasan-batasan dalam melakukan tindakan dan harus terus di lestarikan akan. Sebagaimana diketahui bahwa Peran kebudayaan mempunyai pengaruh besar dalam kelangsungan hidup manusia.

4. Wujud Kebudayaan

Budaya dapat diartikan sebagai pikiran akal budi atau adat istiadat. Sehingga wujudnya tersebut kebudayaan memiliki beberapa pembagian. wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga wujud (j.j Hoenigman (Koentjaraningrat 2009: 150) yaitu:

- a. Gagasan (Wujud Ideal)

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan, ide-ide, gagasan, nilai, norma peraturan dan sebagainya yang sifatnya abstrak dan dapat diraba dan disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala atau alam pikiran warga masyarakat.

- b. Aktivitas (Tindakan)

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. perwujudan gagasan dalam kebudayaan, aktivitas dibagi menjadi pelaku verbal dan non verbal.

- c. Artefak (karya)

Artefak merupakan wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda atau hal yang dapat diraba, dilihat dan didokumentasikan, sifatnya yang kongkrit diantara ketiga wujud kebudayaan.

C. Kepemimpinan Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa memiliki berbagai peran/tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya menurut rambu-rambu yang telah diatur secara normatif.

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha(2001:92) merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa menugaskan atau dibantu oleh Perangkat Desa sesuai SOTK Pemerintah Desa.

Kepala Desa merupakan jabatan pemerintahan yang dipilih oleh warga Desa yang memenuhi syarat sebagai Pemilih melalui proses demokrasi atau Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sementara pengangkatan dan pelantikannya dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil Pilkades.

2. Peran dan Fungsi Kepala Desa

Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 10 di sebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat desa mempunyai Tugas dan Fungsi yang di antaranya sebagai berikut :

- a. Pasal 6 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa berbunyi :
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

D. Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian PPKn

Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PKN merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga Negara serta pendidikan pendahulu bela Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara . Dari pengertian dan ciri-ciri PKN diartikan bahwa PKN merupakan mata pelajaran yang bertujuan membentuk karakteristik warga Negara dalam hal, terutama membangun bangsa dan Negara dengan mengandalkan pengetahuan dan kemampuan dasar dari mata pelajaran PKN dengan materi pokoknya demokrasi politik atau peran warga Negara dalam aspek kehidupan.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi penting ketika pemerintah menetapkan PKN menjadi salah satu mata pelajaran yang diwajibkan untuk dimuat dalam kurikulum sekolah. Hal ini dilihat dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 yang antara lain mewajibkan isi kurikulum memuat pendidikan kewarganegaraan yang pada prinsipnya bertujuan membentuk good citizenship dan menyiapkan warga Negara untuk masa depan. 9 Hakikatnya pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga Negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela Negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan Negara.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga Negara sadar bela Negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa (Damri, M. Pd, Fauzi Eka Putra, and M. I. Kom. : 2020)

2. Tujuan PPKn

a. Menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, serta mengantarkan mahasiswa sekali WNI yang memiliki :

- 1) Wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dengan cinta tanah air
- 2) Wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional
- 3) Pola pikir, sikap yang komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan

2. Mendidik mahasiswa memiliki motivasi bahwa pendidikan kewarganegaraan yang diberikan berkaitan erat dengan peranan dan kedudukan serta kepentingan mereka sebagai individu, anggota keluarga anggota masyarakat, dan sebagai WNI yang terdidik serta bertekad dan bersedia untuk mewujudkannya

3. Memberikan pemahaman akan hubungan antara warga negara dan negaranya, harus terus ditingkatkan agar mahasiswa dapat menjawab

tantangan masa depan sehingga memiliki etos bela negara dalam profesinya masing-masing. PT sebagai institusi ilmiah juga harus dapat mengembangkan ilmu dan teknologi(iptek) untuk mencetak kader pimpinan bangsa yang dapat di harapkan dapat berperan dalam pembangunan

4. Memberikan pemahaman filosofi dan bahasan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

5. Ruang Lingkup PPKn

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, meliputi:

- a. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia.
- c. Ketahanan Nasional dan Geostrategi Indonesia.
- d. Integrasi Nasional.
- e. Identitas Nasional Indonesia.
- f. Hak dan kewajiban warga negara.
- g. Demokrasi di Indonesia.
- h. Konsep negara dan konstitusi.
- i. Otonomi Daerah serta Good and Clean Governance.

Masing-masing ruang lingkup tersebut akan dibahas lebih dalam pada beberapa modul. Setiap bidang ilmu harus memenuhi syarat ilmiah, yaitu memiliki objek, metode, sistem, dan sifat universal. Adapun objek Pendidikan Kewarganegaraan terdiri atas objek material dan objek formal. Anda dengan materi/bahan ini akan dapat memahami arti pentingnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan diharapkan setelah mempelajari Modul 1, Anda akan memahami:

- a. Latar belakang Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan.
- c. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan.
- d. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan.
- e. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan.

E. Penelitian Relevan

Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini. Oleh Effendi, T. N. Tahun 2013 penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa budaya gotong-royong sebagai sebuah nilai moral (values) mempunyai akar filosofis dalam kajian akademis. Ditunjukkan bahwa dalam budaya gotong royong melekat nilai-nilai modal sosial yang diperlukan untuk kemajuan dan mensejahterakan masyarakat. Ketiga, ditelaah secara singkat situasi.

Perubahan Kehidupan Gotong Royong Masyarakat Pedesaan Di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran oleh Widaty, C. Tahun 2020. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan kehidupan gotong royong masyarakat pedesaan di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode etnografi dengan pendekatan kualitatif.

Perubahan perilaku bergotong royong masyarakat sekitar perusahaan tambang batu bara di Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang oleh Suprihatin, I. 2014 penelitian ini bertujuan untuk menjadi inspirasi dan gambaran dalam melaksanakan penelitian. Dalam hal ini, penulis mengambil penelitian terdahulu tentang dampak pertambangan batu bara dan kegiatan gotong royong.

Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat oleh Pasya, Gurniwan Kamil tahun 2000 penelitian ini bertujuan untuk solidaritas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama mereka yang membentuk komunitas-komunitas, karena dalam komunitas seperti ini akan terlihat dengan jelas. Gotong-royong terjadi dalam beberapa aktivitas kehidupan, seperti gotong-royong dalam bentuk kerja bakti, dilakukan untuk kepentingan bersama; gotong-royong dalam bentuk tolong menolong pada saat melakukan pesta pernikahan, atau khitanan, beberapa hari sebelum pesta akan dilakukan terjadi sumbangan dari kenalan, tetangga ataupun kerabat datang membantu dalam bentuk bahan makanan, uang, ataupun tenaga, kemudian bantuan ini harus dikembalikan minimal dengan nilai yang sama.